

**Lemparan Mercon
Picu Ricuh**

DEMO tolak UU TNI di depan gedung negara Grahadi, Jl Gubernur Surya, Surabaya berakhir ricuh, Senin (24/3/2025). Itu setelah massa yang semula berdiri di depan pintu masuk sisi timur tiba-tiba melempari botol air mineral, batu, mercon ke arah polisi yang berjaga di depan Gedung Grahadi Surabaya. Bahkan massa tampak melempar molotov ke area dalam Gedung Grahadi Surabaya. Kawat berduri di depan Grahadi berusaha ditarik massa sekitar pukul 16.15 WIB. Mereka terus melempar polisi dengan mercon, batu, atau botol minuman. Polisi langsung menyemprot massa dengan air dari water cannon secara terus-terusan agar massa mundur. Berita lengkap baca halaman 5. (foto:istimewa)

ADA THAKSIN SHINAWATRA DI DANANTARA, DISTRUST MENGANGA

○ *Kena Kudeta di Thailand, Terseret Kasus Korupsi* ○

Harap-harap cemas pasar terhadap nama-nama yang masuk daftar kepengurusan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) terbukti. Beberapa nama dinilai kontroversial dan membawa sentimen kurang baik pada pasar. Salah satunya adalah Mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat yang telah diumumkan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani, Senin (24/3/2025). Thaksin punya deretan kasus seperti korupsi dan penghindaran pajak. Bahkan dia digulingkan dalam sebuah kudeta militer pada 2006 yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin, atas dasar tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ada juga nama Ray Dalio dan Chapman Taylor. Diketahui keduanya adalah pengendali dan founder dari Global Hedge Fund yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Apa jaminannya tidak ada benturan kepentingan dengan usaha hedge fund (dan nasabah di belakangnya) dalam setiap aksi korporasi Danantara? Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sendiri ditutup melemah 96,96 poin atau 1,55 persen ke 6.161 pada sesi terakhir perdagangan Senin (24/3/2025). Rosan menepis merahnya IHSG terkait Danantara. Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengaku menemui sejumlah investor pasar modal usai IHSG rontok. Ditegaskan kondisi global sekarang tidak mudah. Ada volatilitas pasar, ketidakpastian geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas. Akankah distrust (ketidakpercayaan) terhadap Danantara makin menganga?

Baca Hal 11....

RAY DALIO

Pendiri Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia dengan aset kelolaan \$124 miliar. Dikenal sebagai inovator strategi investasi seperti risk parity, alpha overlay, dan all weather portfolio, yang merevolusi pendekatan investasi institusional.

JEFFREY SACH

Ekonom global, penulis The End of Poverty (2005), penerima Blue Planet Prize (2015) dan Tang Prize (2022). Penasihat tiga Sekjen PBB dalam kebijakan pembangunan.

CHAPMAN TAYLOR

Investor senior di Capital Group dengan lebih dari 30 tahun pengalaman. Fokus pada investasi di Asia, khususnya telekomunikasi dan pasar negara berkembang seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia.

THAKSIN SHINAWATRA

Mantan PM Thailand (2001–2006), mendorong kebijakan pro rakyat dan pertumbuhan ekonomi. PDB Thailand naik dari 4,9T ke 7,1T baht dalam lima tahun. Tetap berpengaruh dalam politik Thailand.



Nama Asing di Pengurus BPI Danantara Jadi Dewan Penasihat:

Wamenag Tak Persoalkan Ormas Minta THR: Itu Budaya Lebaran

JAKARTA- Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi'i tak mempersoalkan jika Ormas meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke para pengusaha lantaran dianggap sebagai budaya berlebaran di Indonesia sejak dulu kala.

"Saya rasa itu budaya lebaran Indonesia sejak dahulu kala. Tak perlu dipersoalkan," kata Syafi'i dalam video yang dikutip Swain (24/3/2025).

Syafi'i berkelakar terkadang ormas-ormas tersebut mendapatkan THR, terkadang juga tidak mendapatkannya.

"Ya mungkin ada yang lebih ada yang kurang. Ya kadang-kadang dapat. Kadang-kadang enggak," kata dia.

Belakangan ini ramai kabar ormas membuat resah karena meminta uang THR kepada para pengusaha di pelbagai wilayah di Jabodetabek. Salah satunya datang dari Depok. Polisi tengah menyelidiki sebuah edaran permintaan uang THR dari tiga ormas kepada pengusaha di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Surat edaran oleh tiga ormas itu turut beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut, ketiga ormas itu meminta THR dengan dalih social control keamanan menjelang Lebaran.

"Sejumlah pemilik usaha di Sawangan mengaku resah setelah menerima tiga surat dari organisasi masyarakat (ormas) yang meminta dana keamanan Hari Raya Idulfitri," demikian keterangan dalam unggahan yang beredar.

Pada hal sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menaruh sorotan terhadap praktik ini dan meminta aparat hukum mengambil tindakan tegas.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan (19/3/2/25).

"Presiden tadi memerintahkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk menindak hal-hal seperti itu. Nanti dipelajari dengan baik. Pokoknya harus tertib," ujar Luhut.

Sementara itu Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengatakan pemerintah akan menempuh langkah hukum untuk menyelesaikan keluhan pengusaha atas aktivitas ormas yang meminta THR.

"Kita terus berkoordinasi dengan para aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," katanya.

Dalam keterangan tertulis, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko,



Wakil Menteri Agama (Wamenag) Muhammad Syafi'i

mengatakan setiap laporan yang masuk dari pengusaha akan ditindaklanjuti secara serius.

"Polri tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi nasional," tambahnya.

Polda Metro Jaya telah mengimbau masyarakat agar melapor jika ada ormas yang meminta THR secara paksa. Sebab, menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E. Zulpan, pemaksaan itu bisa dikategorikan sebagai bentuk pemerasan.

Keluh Kesah Pengusaha

Pengusaha sekaligus Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, mengaku telah mendengar dan menampung banyak keluhan dan keresahan dari para pelaku usaha di lapangan soal permintaan berbagai ormas.

"Dari keluhan-keluhan yang

masuk, modusnya memang bermacam-macam dari mulai pungutan liar, uang keamanan, jatah proyek, jatah THR, dan lain-lain," jelasnya.

Akibat praktik ini, para pengusaha harus menanggung kerugian akibat biaya tambahan.

"Ulah premanisme ini juga sampai menyebabkan gangguan keamanan dan menghambat operasional industri," katanya.

Menurut Shinta, praktik ini tidak hanya merugikan pemilik perusahaan.

"Gangguan yang muncul akibat tindakan semacam ini dapat memicu peningkatan biaya berusaha, meningkatkan ketidakpastian dalam berbisnis, serta menurunkan kepercayaan investor untuk

menanamkan modalnya di Indonesia," paparnya.

Jika hal demikian terus terjadi, kata Shinta, daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi akan menurun.

Ketua Himpunan Kawasan Industri, Sanny Iskandar, mengatakan bahwa gangguan ormas hampir terjadi di semua kawasan industri di Indonesia, terutama di daerah seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

Sanny memperkirakan, total kerugian yang ditimbulkan bisa mencapai ratusan triliun rupiah, baik dari investasi yang tidak jadi masuk ke Indonesia maupun dari biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini. (wid, rls, ant, kcm/dya)



Viral di medsos banyaknya amplop dari Ormas yang minta THR ke pelaku usaha. (X.ist)

Bisakah Diberantas? Ini Penjelasan Ahli

KRIMINOLOG Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, mengatakan pemerasan berkedok meminta THR kepada pengusaha tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi.

"Ada situasium perekonomian Indonesia yang makin berat, makin lesu. Pemerintah sibuk omon-omon tidak pernah deliver janjinya. Sibuk dengan program populis yang semuanya makan duit," tukasnya.

Dia menggarisbawahi bahwa praktik tersebut tidak eksklusif dilakukan oleh para preman. Aparat, kata dia, juga bisa melakukan tindakan tersebut.

"Ada aparat TNI, Polri, Pemda, Imigrasi, Satpol PP. Mereka meminta sesuatu dari pengusaha karena mereka punya kewenangan," sebutnya.

Semuanya, kata Adrianus, mempraktikkan tindakan yang

disebutnya premanisme.

"Premanisme itu suatu keyakinan bahwa dengan model kegiatan preman, seseorang bisa dapat duit. Sulit untuk menghilangkan praktik premanisme karena semua orang mendapatkan manfaatnya," ujarnya.

Menurut Adrianus, praktik minta jatah THR ini akan terus berulang dan bisa terjadi dalam berbagai bentuk.

"Sepanjang sejarah, pengusaha swasta selalu dilihat sebagai sapi perah yang bisa dieksploitasi dengan berbagai alasan. Minta THR, minta pekerjaan, minta jadi vendor," jelasnya.

Di sisi lain, para anggota ormas yang "dibina" merasa memiliki beking kuat, sehingga berani bertindak semena-mena di lapangan layaknya preman, imbuhnya.

Setelah masa Reformasi keterlibatan dan dukungan negara

pada organisasi-organisasi ini melemah.

Tapi itu bukan berarti praktik dan keberadaan organisasi preman menghilang.

Sebaliknya, peneliti Ian Wilson dalam artikelnya *Continuity and Change: The Changing Contours of Organized Violence in Post-New Order Indonesia* menyebut semangat desentralisasi dan 'demokratisasi' era Reformasi juga turut menyuburkan tumbuhnya organisasi-organisasi preman di tingkat lokal.

Mereka tidak bergantung pada patron negara, tidak terpusat, saling berkompetisi untuk memperebutkan remahan-remahan sumber ekonomi, dan menawarkan jasa 'keamanan' pada sektor-sektor swasta, termasuk pemilik-pemilik pabrik untuk menakut-nakuti pekerja, membubarkan unjuk rasa, dan mengintimidasi jurnalis. (wid, ist/dya)

Usai Lebaran, Komisi III Bentuk Panja Revisi KUHAP

JAKARTA-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas draf revisi Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau revisi KUHAP. Panitia kerja (panja) akan mulai dibentuk usai pembukaan masa sidang yaitu setelah lebaran Idul Fitri. Diketahui, DPR akan memulai masa reses pada 26 Maret 2025.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, Ketua Panja RUU KUHAP akan dipimpin pimpinan Komisi III DPR.

Sementara itu, masing-masing fraksi akan mengirimkan utusannya sebagai anggota panja.

"Jadi setelah kita reses kita langsung bentuk panitia kerjanya kan nggak mungkin 46 kami masing masing fraksi ada utusannya itulah panjangnya," kata Hinca di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Hinca mengatakan, saat ini, Komisi III DPR tengah belanja masalah ke seluruh elemen masyarakat sebagai materi untuk menyusun RUU KUHAP. Sebab, KUHAP belum pernah direvisi setelah 44 tahun sejak resmi diberlakukan pada 1981.

Dia mengatakan, RUU KUHAP merupakan usul inisiatif DPR RI, dan setelah itu pemerintah akan memberikan daftar inventarisasi masalah (DIM) atas pasal-pasal tersebut.

"Kami sekarang harus belanja masalah sebanyak banyaknya baik Komisi 3 baik masing masing fraksi, baik masing masing anggota, kenapa karena ini sesuatu yang sangat penting dalam bernegara. Ini KUHAP berlaku untuk kita semua," kata dia.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan bahwa Komisi III akan mengundang banyak ahli yang memiliki kapasitas untuk memberi masukan tentang aturan kepolisian Indonesia. Keterbukaan menjadi tolok ukur komisinya untuk membahas RUU Polri.

"Lihat lah kalau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) saja kami bikin belum kami mulai, panjangnya itu sudah kami sangat terbuka, bahkan kami bikin powerpointnya. Kami jelaskan substansinya. Kami undang banyak orang datang," ujarnya.

Menurut dia, Komisi III selalu terbuka dengan pembahasan apa pun. Hinca menyebut keterbukaan itu seperti kasus besar yaitu Ferdy Sambo hingga kasus yang dialami oleh masyarakat sipil. "Untuk koreksi kepolisian, jangan menetapkan tersangka pada hal-hal yang kecil itu tadi," ucap Hinca.

Ia pun memastikan jika RUU Polri dibahas di Komisi III maka pembahasannya akan dilakukan secara terbuka seperti yang dilakukan saat membahas RUU KUHAP.

Semua Kamar Penjara Ada CCTV

Salah satunya revisi KUHAP adalah rencana aturan yang



Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan

mewajibkan setiap ruang tahanan harus memasang atau memiliki kamera pengawas (CCTV).

Ketua Komisi III DPR Habiburokhan mengatakan, aturan baru soal pemasangan CCTV dibuat sebagai pencegahan terjadinya pelanggaran di rumah tahanan hingga lembaga pemasyarakatan. Termasuk, kata dia, sejumlah aksi kekerasan dan penyiksaan yang terjadi di balik jeruji penjara.

"Salah satu kuncinya adalah kami akan mengatur bahwa dalam setiap tempat pemeriksaan dan setiap tempat penahanan di ruang tahanan harus ada kamera pengawas," kata dia dikutip, Senin (24/3/2025).

"Kesalahan [kasus] kemarin yang di Palu itu kan justru terungkap nih karena ada kamera pengawas. Setelah kita RDPU, Propam-nya turun, dicek dari videonya, ketemu ternyata dari tengah kamera pengawas ketemu."

Kasus tersebut merujuk pada kematian seorang tahanan di Polresta Palu, akhir 2024. Pada saat itu, polisi menahan Bayu Adhitiawan dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Belakangan, Bayu dilaporkan meninggal dunia dengan klaim mengalami sakit.

Akan tetapi, kasus terungkap usai polisi memeriksa rekaman kamera pengawas. Dalam data tersebut, Bayu terlihat mengalami penganiayaan fisik dari petugas pengamanan dan tahanan lainnya.

Menurut Habiburokhan, kewajiban pemasangan CCTV akan diterapkan pada seluruh kepolisian daerah atau polda. DPR pun mengklaim akan membantu kepolisian untuk pengadaan kamera pengawas baru di APBN selanjutnya.

"Sekarang kan kamera pengawas sesuatu yang nggak mahal lagi, bisa dibeli dengan harga yang cukup murah dan kita akan support anggarannya, APBN-nya kita support dari sini untuk pengadaan kamera pengawas," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Selain pemasangan CCTV, Revisi KUHAP juga akan memperkuat pendampingan advokat terhadap tersangka dan saksi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya intimidasi dan kekerasan selama proses pemeriksaan.

"Yang kedua, yang paling penting

adalah pendampingan dari advokat terhadap tersangka. Kebanyakan orang-orang yang mengalami kekerasan itu dalam kasus dia tidak didampingi ketika diperiksa, apakah sebagai saksi, apakah sebagai tersangka," ujar Habiburokhan.

"Advokat yang tadinya hanya bisa mendampingi orang yang diperiksa sebagai tersangka, sekarang bisa dan wajib, berhak mendampingi ketika masih saksi. Jadi nggak bisa diintimidasi lagi walau pun masih berstatus saksi."

Pembatasan Media

Di sisi lain, Komisi III DPR RI sepakat untuk menghapus Pasal 142 ayat (3) revisi Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang melarang advokat berkomunikasi dengan terdakwa hingga berpendapat di luar pengadilan.

Keputusan ini diambil saat Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (PERADI-SAI) Juniver Girsang, Julius Ibrani dari PBHI, dan guru besar Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita, Senin (24/3/2025).

"Tadi diputuskan di dalam rapat Komisi bahwa advokat tidak dilarang memberikan penjelasan keterangan apa yang ditangani lawyer tersebut kepada publik," kata Juniver usai rapat bersama Komisi III.

"Pokoknya kita (hapus), masa advokat sendiri yang ada aturan begini? sangat-sangat tidak fair," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhan ketika membacakan keputusan untuk menghapus ayat tersebut.

Di sisi lain, revisi KUHAP juga mengatur bahwa setiap orang yang berada di sidang pengadilan dilarang mempublikasikan proses persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan.

Artinya media tidak bisa menyiarkan jalannya persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan.

"Yang tidak boleh adalah selama dalam persidangan, tidak bisa dipublikasikan dan kemudian itu memberi siaran langsung, karena itu bisa mempengaruhi saksi-saksi sebelum diperiksa kemudian," kata Juniver. (din, rls, ist, ant/dya)

○○○

Beberapa Poin Revisi KUHAP

Hapus Larangan Advokat

Bicara di Luar Pengadilan

Sebelumnya dalam Pasal 142 ayat (3) diatur bahwa Advokat dilarang:

- Menyalahgunakan hak untuk berkomunikasi dan mengunjungi Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana.
- Memberikan pendapat diluar pengadilan terkait permasalahan kliennya.
- Mempengaruhi tersangka atau saksi untuk tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Kini keseluruhan Pasal 142 ayat 3 sudah dihapus dari draf sementara.

Tentang Penyidik

Aturan ini tercantum dalam Pasal 6 RUU KUHAP, yang membagi kategori penyidik sebagai berikut:

Penyidik terdiri atas:

- Penyidik Polri
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Penyidik Tertentu

Penyidik Polri merupakan penyidik utama yang memiliki kewenangan untuk menangani semua tindak pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kepangkatan, pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi penyidik diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan lebih rinci, "Penyidik Tertentu" mencakup:

- Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) yang bertugas dalam perkara terkait kelautan dan perikanan
- Penyidik Jaksa, yang dalam rancangan awal hanya berwenang dalam kasus pelanggaran HAM berat.

Rangkuman RUU KUHAP

sebagai berikut:

1. Perubahan Besar dalam Sistem Peradilan

Jika draf ini disahkan, kewenangan jaksa dalam penyidikan kasus pidana umum bisa berkurang drastis. Hal ini dapat berdampak pada koordinasi antara Polri dan Kejaksaan.

2. Dinamika Politik dan Hukum

Pembahasan RUU ini menunjukkan adanya tarik-ulur kepentingan antara berbagai lembaga penegak hukum. Beberapa pihak menilai ada upaya membatasi peran kejaksaan, sementara lainnya berpendapat bahwa Polri memang seharusnya menjadi penyidik utama.

3. Dampak bagi Masyarakat

RUU ini akan berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, pencucian uang, dan kejahatan lainnya. Masyarakat perlu mencermati apakah perubahan ini akan mempercepat atau justru menghambat penegakan hukum.

Saksi Sebut Petani Puas soal Kebijakan Impor Gula, Tom Lembong: Saya Lega

JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menilai kasus dugaan korupsi impor gula yang menjeratnya semakin terungkap kebenarannya. Hal itu disampaikan Tom Lembong usai menjalani persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/3/2025).

Salah satu saksi yang dihadirkan adalah eks Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Robert J. Bintaryo.

"Saya hari ini semakin lega, karena kebenaran semakin terungkap, semakin banyak kebenaran yang terungkap," ujar Tom.

Dalam kesaksiannya, Robert mengakui bahwa para petani puas dengan kebijakan impor gula yang dilakukan di era Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan 2015-2016.

Mulanya, Tom Lembong mengkonfirmasi ke Robert ihwal kesulitan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dalam memenuhi target pengadaan 200 ribu ton gula dengan harga yang dipatok HPP (Harga Pembelian Petani) minimal Rp 8.900 per kilogram.

"Kalau pakai kata-katanya Pak Robert, PT PPI kesulitan memenuhi target pengadaan 200 ribu ton dengan harga HPP, harga pembelian petani, Rp 8.900 per kilogram. HPP kan?" tanya Tom kepada Robert dalam persidangan.

"Harga HPP bisa tapi harga lelangnya [gula di pasaran] yang tinggi," jawab Robert.

Tom kemudian menegaskan ulang bahwa kondisi tersebut menunjukkan petani memilih menjual gula dengan harga pasar yang lebih menguntungkan dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, kata dia, PPI tidak perlu menjalankan peran sebagai penjamin harga gula agar tidak jatuh di bawah HPP.

"Berarti bahwa petani puas dengan harga yang mereka peroleh di pasaran, ya, sehingga mereka tidak lagi perlu menjual kepada PT PPI, ya? Jadi, berarti PT PPI tidak perlu menjalankan fungsi sebagai penjamin, menjamin bahwa harga tebu, harga gula tidak jatuh di bawah harga yang dipatok dalam hal ini Rp 8.900, ya?" tanya Tom.

"Iya, benar," jawab Robert.

Robert kemudian mengakui bahwa hal tersebut menunjukkan para petani puas dengan kebijakan importasi gula di era Tom Lembong.

"Berarti petani sudah puas dengan asas willing buyer willing seller, mereka dengan sukarela, tidak



dipaksa melepas gula, tebu mereka, di harga yang di atas harga yang dipatok, betul?" tanya Tom.

"Iya," timpal Robert.

Tom kemudian menyampaikan bahwa pernyataan tersebut perlu ditegaskannya lantaran sebelumnya ia dituduh melanggar UU Perlindungan Petani lewat kebijakan importasi gula tersebut.

"Kenapa ini relevan? Karena saya dituduh melanggar UU Perlindungan Petani. Berarti kalau petani dengan sukarela, tanpa keluhan melepas tebu mereka ke pasar dengan harga di atas, berarti, kan, tidak merugikan petani?" tanya Tom Lembong.

"Iya," jawab Robert membenarkan.

Dengan adanya kesaksian itu, Tom Lembong mengaku makin lega. Sebab, setiap kebenaran terus terungkap dalam persidangan kasus yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.

Ia menekankan bahwa kebijakan importasi gula yang telah dikeluarkannya justru tidak merugikan petani tebu.

"Petani itu happy-happy saja, puas dengan harga yang mereka bisa peroleh di pasaran, dan mereka dengan sukarela, tidak ada paksaan mereka melepas menjual tebu mereka, karena mereka di pasaran di harga di atas harga patokan, ya," imbuh dia.

Untuk itu, Tom Lembong pun menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Petani seperti yang dituduhkan jaksa kepadanya.

"Petani dengan mudah bisa menjual gulanya, tebunya, di atas harga [HPP] itu, sampai PPI itu enggak kebagian target, tidak bisa mencapai target pengadaan gula untuk melakukan stabilisasi harga dan stok melalui operasi pasar," tuturnya.

"Berarti petani happy-happy saja, ya tidak ada masalah gitu, ya. Jadi, jelas tidak ada pelanggaran UU Perlindungan Petani," pungkask dia.

Dakwaan Tom Lembong

Dalam perkara ini, Tom Lembong

telah didakwa melakukan korupsi importasi gula. Perbuatan itu disebut turut merugikan negara hingga Rp 578,1 miliar.

Tom Lembong didakwa bersama-sama dengan Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI).

Serta Tony Wijaya Ng (Direktur Utama PT Angels Products), Then Surianto Eka Prasetyo (Direktur PT Makassar Tene), Hansen Setiawan (Direktur Utama PT Sentra Usahatama Jaya), Indra Suryaningrat (Direktur Utama PT Medan Sugar Industry), Eka Sapanca (Direktur Utama PT Permata Dunia Sukses Utama), Wisnu Hendraningrat (Presiden Direktur PT Andalan Furnindo), Hendrogiarto W. Tiwow (Direktur PT Duta Sugar International), Hans Falita Utama (Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur), serta Ali Sandjaja Boedidarmo (Direktur Utama PT Kebun Temu Mas).

Menurut jaksa, Tom Lembong menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) tanpa didasarkan rapat koordinasi dan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Persetujuan impor itu diberikan kepada sepuluh perusahaan gula swasta, yakni PT Angels Products, PT Makassar Tene, PT Sentra Usahatama Jaya, PT Medan Sugar Industry, PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Furnindo, PT Duta Sugar International, PT Berkah Manis Makmur, PT Kebun Tebu Mas, dan PT Dharmapala Usaha Sukses.

Jaksa menyebut total ada 21 surat persetujuan impor GKM yang dikeluarkan oleh Tom Lembong kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Izin itu disebut menyebabkan mahalan harga yang dibayarkan PT PPI dalam pengadaan Gula Kristal Putih (GKP) untuk penugasan stabilisasi harga/operasi pasar. Selain itu, menyebabkan kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Kedua hal tersebut telah merugikan negara senilai Rp 515 miliar. Angka ini menjadi bagian kerugian negara yang berdasarkan audit nilainya mencapai Rp 578,1 miliar.

Selain itu, Tom juga disebut memberikan izin kepada PT Angels Products untuk mengimpor GKM dan mengolahnya menjadi GKP. Padahal, saat itu stok GKP dalam negeri mencukupi.

Kemudian, Tom Lembong juga disebut tidak mengendalikan distribusi gula tersebut. Di mana, distribusi gula itu seharusnya dilakukan melalui operasi pasar.

Atas perbuatannya, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (Wid rls, ist, kun/dya)

10 orang yang mendapat keuntungan dalam perkara ini

- Menguntungkan Tony Wijaya Ng melalui PT Angels Products sebesar Rp 144.113.226.287,05 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT. Angels Products dengan INKOPKAR, INKOPPOL, dan PT PPI;
- Menguntungkan Then Surianto Eka Prasetyo melalui PT Makassar Tene sebesar Rp 31.190.887.951,27 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Makassar Tene dengan INKOPPOL dan PT PPI;
- Menguntungkan Hansen Setiawan melalui PT Sentra Usahatama Jaya sebesar Rp 36.870.441.420,95 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Sentra Usahatama Jaya dengan INKOPPOL dan PT PPI;
- Menguntungkan Indra Suryaningrat melalui PT Medan Sugar Industry sebesar Rp 64.551.135.580,81 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Medan Sugar Industry dengan
- Menguntungkan Eka Sapanca melalui PT Permata Dunia Sukses Utama sebesar Rp 26.160.671.773,93 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Permata Dunia Sukses Utama dengan INKOPPOL dan PT PPI;
- Menguntungkan Wisnu Hendraningrat melalui PT Andalan Furnindo sebesar Rp 42.870.481.069,89 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Andalan Furnindo dengan INKOPPOL dan PT PPI;
- Menguntungkan Hendrogiarto A Tiwow melalui PT Duta Sugar International sebesar Rp 41.226.293.608,16 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Duta Sugar International dengan PT PPI;
- Menguntungkan Hans Falita Utama melalui PT Berkah Manis Makmur sebesar Rp 74.583.958.290,80 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Berkah Manis Makmur dengan INKOPPOL, PT PPI, dan SKKP TNI-Polri/PUSKOPPOL;
- Menguntungkan Ali Sandjaja Boedidarmo melalui PT Kebun Tebu Mas sebesar Rp 47.868.288.631,27 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Kebun Tebu Mas dengan PT PPI;
- Menguntungkan Ramakrishna Prasad Venkatesha Murthy melalui PT Dharmapala Usaha Sukses sebesar Rp 5.973.356.356,22 yang diperoleh dari kerja sama impor gula PT Dharmapala Usaha Sukses dengan INKOPPOL.

Aksi Tolak RUU TNI di Surabaya Rusuh, Polisi Tangkap Sejumlah Pendemo

SURABAYA - Unjuk rasa menentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI yang baru disahkan DPR di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur pada Senin, (24/3/2025) berujung rusuh. Polisi melepaskan water cannon untuk menghalau massa dari depan Grahadi. Sejumlah pendemo pun ikut ditangkap dalam unjuk rasa tersebut.

Massa aksi yang terdiri dari kelompok masyarakat sipil itu mulai berorasi di lokasi pada pukul 15.00 WIB. Para pengunjung rasa terlihat membawa berbagai spanduk penolakan UU TNI.

Pada pukul 16.15 WIB, sejumlah pendemo membawa banner bergambar Presiden Prabowo dan 9 aktor di balik RUU TNI. Banner itu pun dibakar bersama saat aksi demo. "Mereka-mereka inilah aktor di balik RUU TNI, mari kita bakar mereka di sini," kata orator saat demo.

Setelah itu, sebagian massa aksi terlihat melempari botol dan batu ke arah polisi yang tengah berjaga pada pukul 16.35 WIB. Polisi pun sempat menahan diri hingga akhirnya menembakkan gas air mata pukul 16.45 WIB.

Pada pukul 17.15 WIB, polisi mulai terlihat memboyong salah satu pendemo. Dia dituduh membawa bom molotov dan mabuk. Saat pemeriksaan, pendemo tak terbukti membawa bom molotov.

Massa aksi tetap bertahan di lokasi hingga pukul 18.15 WIB. Polisi pun mulai berusaha membubarkan massa secara paksa dengan tim dan mobil rantis Brimob.

Para pendemo akhirnya berlarian sejauh 700 meter hingga Jalan Pemuda atau depan Plaza Surabaya. Dalam video yang beredar, polisi juga terlihat menyisir dan menangkap massa demo.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada jumlah pasti untuk pendemo yang ditangkap. Namun, situasi di sekitar lokasi berangsur kondusif pukul 19.15 WIB.

Sebagai informasi, massa bergerak menuju depan Gedung Grahadi Surabaya, Senin 24 Maret 2025. Massa yang mengatasnamakan Front Anti Militarisme itu melakukan aksi untuk menolak Revisi Undang-undang TNI.

Pantauan, massa aksi sudah mulai berkumpul pukul 14.00 WIB. Mereka kompak menggunakan baju hitam.

Dikonfirmasi soal penangkapan massa aksi, Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan mengaku pihaknya masih melakukan pendataan.

"Masih kita lakukan pendataan. Nanti kita akan sampaikan," kata Luthfie, ditemui di Gedung Grahadi.



Massa mengepung Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa menentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI yang baru disahkan DPR. (ist)

Luthfie menyebut, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan apakah orang yang ditangkap itu juga diduga melakukan tindak pidana.

"Tentu nanti kami sampaikan, tadi kami dalam ada yang kita amankan. Apakah itu melakukan pidana atau [tidak]," ucapnya.

Di sisi lain, ia menyebut sejumlah aparat kepolisian juga mengalami luka. Namun ia belum menjelaskan jumlah dan penyebabnya.

"Kita dalam. Kita akan sampaikan," ucapnya.

Lebih lanjut, Luthfie juga mengucapkan terima kasih kepada massa aksi yang sudah bersedia pulang dan tertib. Menurutnya demonstrasi hari ini hanya diwarnai insiden yang tak krusial.

"Mudah-mudahan hari ini pembelajaran aspirasi tetap kita akan layani, tapi kita berharap bahwa aturan tolong ditaati. Tadi sedikit ada lempar-lemparan, tapi Insyaallah tidak ada yang krusial," tambahnya.

Sementara itu, pengacara publik LBH Surabaya Jauhar Kurniawan, mengaku masih melakukan cross check ke Mapolrestabes Surabaya.

"Sementara ini kami akan cek terkait jumlahnya ke Mapolrestabes Surabaya," ujar Jauhar.

Koordinator Kontra Surabaya, Fatkhul Khoir memastikan jumlah massa yang aksi yang ditangkap berjumlah 25 orang.

Namun mereka belum bisa melakukan pendampingan karena belum mendapatkan kuasa.

"Sementara kami data yang di Mapolrestabes ada 25 orang. Tapi identitasnya belum dapat detail semua, baru dua yang berhasil kami identifikasi," ucap Fatkhul.

"Kami sempat koordinasi dengan pihak penyidik, cuma memang belum diberikan akses untuk masuk karena memang belum ada kuasa," tambahnya.

10 Orang Diduga Hilang di Malang

Demonstrasi menolak Undang-Undang TNI atau UU TNI yang baru-baru ini disahkan DPR RI jugaberlangsung ricuh di Malang pada Minggu (23/3/2025) malam.

Menurut pernyataan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pos Malang, demo yang awalnya berlangsung kondusif sejak pukul 15.45 WIB di depan Gedung DPRD Kota Malang.

Eskalasi mulai meningkat sekitar pukul 18.20 WIB ketika sejumlah massa aksi mulai menerobos masuk Gedung DPRD melalui pintu utara.

"Pada 18.30-18.40 (10-20 menit setelahnya), aparat Kepolisian bersama dengan TNI mulai melakukan penyisiran dan memukul mundur massa di sekitaran Balai Kota Malang, Jl. Suropati, Jl. Sultan Agung hingga Jl. Pajajaran," bunyi pernyataan LBH Pos Malang.

Aparat juga dilaporkan melakukan penyisiran melalui Jl. Gajahmada dengan jumlah kurang lebih dua pleton, berpakaian lengkap dan membawa alat pemukul.

Tim bantuan hukum LBH Pos Malang Wafdul Adif mengatakan, hingga Senin dini hari sekitar enam pendemo telah ditangkap aparat.

"Sejumlah massa aksi ditangkap, dipukul dan mendapatkan ancaman. Tim medis, pers dan pendamping hukum yang bersiaga juga mendapati pemukulan," kata Wafdul, Senin (24/3/2025).

"Hingga malam ini, jumlah massa aksi yang tertangkap dan berhasil diidentifikasi identitasnya sebagai kitar enam orang," ucapnya menambahkan.

Sementara itu, 8-10 orang pendemo dilaporkan hilang kontak berdasarkan pengakuan massa aksi lain. Selain itu, ada sekitar 6-7 pendemo dilarikan ke rumah sakit karena terluka saat bertrokan dengan aparat.

Wafdul menuturkan sekitar puluhan orang juga terluka terdiri dari pendemo, tim medis, hingga pers.

Koordinator LBH Pos Malang Daniel Siagian sebelumnya juga mengatakan pihaknya sedang membantu melakukan evakuasi terhadap massa aksi yang terluka dan menginventarisir data massa aksi yang ditangkap polisi.

Belum dapat mengonfirmasi laporan soal jumlah pedemo yang ditangkap dan orang hilang kepada polisi.

Sementara itu, terpisah, DPRD Kota Malang Jawa Timur, menyatakan siap menampung seluruh aspirasi dari massa demonstrasi yang menolak UU TNI ini. (ama, san, pra, ist/dya)

DAFTAR PERUBAHAN DALAM RUU TNI YANG BARU DISAHKAN

Pasal 3 tentang kedudukan TNI

Perubahan Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2025 mengubah kedudukan TNI. Semula, TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan dalam kebijakan dan strategi pertahanan. Setelah revisi, TNI dikoordinasikan oleh Kementerian Pertahanan dalam strategi pertahanan dan didukung administrasi terkait perencanaan strategis.

Pasal 7 tentang tugas pokok TNI

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2004, TNI memiliki tugas pokok yang terdiri dari operasi militer (OMP) untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Sebelum direvisi, Pasal 7 UU TNI menjelaskan bahwa terdapat 14 tugas OMSP, yakni:

- Mengatasi gerakan separatis dan pemberontakan bersenjata.
- Menangani aksi terorisme.
- Mengamankan perbatasan dan objek vital strategis.
- Melaksanakan misi perdamaian dunia.
- Mengamankan Presiden, Wakil Presiden, dan keluarganya.
- Membendayakan wilayah pertahanan dan pendukungnya sejak dini.
- Membantu pemerintahan daerah.
- Mendukung Polri dalam keamanan dan ketertiban.
- Mengamankan tamu negara setingkat kepala negara.
- Menanggulangi bencana alam dan bantuan kemanusiaan.
- Melakukan pencarian dan pertolongan (search and rescue).
- Mengamankan pelayaran dan penerbangan dari ancaman kejahatan.

Dalam revisi yang disahkan DPR, terdapat dua tugas OMSP tambahan, yakni:

- membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber;
- membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Pasal 47 tentang posisi sipil yang bisa diisi tentara aktif

DPR meloloskan revisi Pasal 47 UU TNI, menambah jabatan sipil yang bisa diisi tentara aktif. Awalnya hanya 10 kementerian/ lembaga, kini menjadi 14, meski mendapat penolakan dari koalisi sipil. Berikut daftar 14 kementerian/ lembaga yang boleh diisi prajurit TNI aktif dalam UU terbaru:

- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
- Pertahanan Negara, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
- Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
- Intelijen Negara
- Siber dan Sandi Negara
- Lembaga Ketahanan Nasional Badan Pencarian dan Pertolongan (SAR)
- Badan Narkotika Nasional
- Badan Pengelola Perbatasan
- Badan Penanggulangan Bencana
- Badan Penanggulangan Terorisme
- Badan Keamanan Laut
- Kejaksaan Republik Indonesia
- Mahkamah Agung

Pasal 53 tentang batas usia pensiun

Perubahan berikutnya adalah tentang batas usia pensiun bagi prajurit TNI. Dalam UU TNI sebelum revisi, usia pensiun prajurit perwira adalah paling lama 58 tahun, sementara untuk bintara dan tamtama adalah 53 tahun. Sementara dalam UU TNI pasca-revisi, batas usia pensiun diatur berdasarkan jenjang yang lebih spesifik dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bintara dan tamtama: 55 tahun
- Perwira hingga pangkat kolonel: 58 tahun
- Perwira tinggi bintang 1: 60 tahun
- Perwira tinggi bintang 2: 61 tahun
- Perwira tinggi bintang 3: 62 tahun
- Perwira tinggi bintang 4: 63 tahun dan dapat diperpanjang dua kali sesuai kebutuhan dengan Keputusan Presiden.

Polemik Aset Pendidikan di Jl Veteran Kita Malang DPRD Minta UM Kaji Ulang Rencana Pengambilalihan



SMA Negeri 8 Malang. (dok. ist)

MALANG- Wacana Universitas Negeri Malang (UM) untuk mengambil alih kembali aset lahannya yang saat ini ditempati oleh empat lembaga pendidikan negeri terus menjadi perhatian publik. DPRD Kota Malang pun mendorong UM untuk mengkaji ulang rencana tersebut dengan mempertimbangkan aspek sosial dan pendidikan.

Adapun empat lembaga

pendidikan yang menduduki lahan milik UM dan terletak di kawasan Jalan Veteran, Kota Malang, di antaranya yakni SDN Percobaan 1 Kota Malang, SDN Sumbersari 3 Kota Malang, SMPN 4 Kota Malang, dan SMAN 8 Kota Malang.

"Selama ada sistem sewa yang diterapkan, itu tidak akan menjadi temuan. Meskipun asetnya tetap milik UM, jika disewakan kepada lembaga pendidikan, maka tidak akan ada persoalan," ujar Anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, Senin (24/3/2025).

Pasalnya diketahui, langkah UM untuk kembali mengelola aset tersebut dilatarbelakangi oleh temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Suryadi, opsi sistem sewa dapat menjadi solusi terbaik. Dengan sistem sewa yang jelas, status dan fungsi aset dapat tetap terjaga

tanpa harus mengorbankan keberlanjutan pendidikan di lokasi tersebut.

Suryadi juga menegaskan, keberadaan sekolah-sekolah di kawasan kelurahan Sumbersari ini telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Sebagai kawasan dengan permukiman padat, kehadiran sekolah-sekolah tersebut menjadi sarana pendidikan yang sangat dibutuhkan.

"Kami berharap UM bisa mengkaji ulang rencana ini. Lingkungan pendidikan seperti ini sangat ideal untuk perkembangan anak-anak. Maka, perlu ada kolaborasi yang baik antara UM, Pemkot Malang, dan Dinas Pendidikan," paparnya.

Lebih lanjut, politisi partai Golkar ini menyebutkan, salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah penyatuan dua sekolah menjadi satu. Menurutnya, opsi ini dapat mengurangi kebutuhan akan lahan baru serta menghemat biaya pembangunan gedung baru jika sekolah-sekolah tersebut harus direlokasi.

Namun, hingga saat ini DPRD Kota Malang masih mempelajari lebih dalam sejarah penggunaan lahan tersebut. Suryadi menekankan perlunya solusi yang menguntungkan semua pihak agar polemik ini bisa diselesaikan dengan baik.

Di sisi lain, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan pihaknya berencana bertemu langsung dengan Rektor UM, Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, untuk membahas lebih lanjut rencana pengambilalihan aset tersebut. Wahyu menegaskan, dirinya belum mengambil sikap karena perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan pihak universitas.

Menurut Wahyu, pemindahan sekolah bukanlah solusi yang ideal. Jika empat sekolah tersebut dipindahkan, maka akan berdampak pada akses pendidikan masyarakat sekitar yang selama ini sangat bergantung pada keberadaan sekolah-sekolah tersebut.

"Jangan mengandai-andai dulu. Kita harus mencari solusi bersama agar tidak ada pihak yang dirugikan," tambahnya. (Santi/Dya)

DLH Kota Batu Libatkan Swasta: Revitalisasi Taman dan Bentuk Kampung Ekologi

BATU- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu berupaya menjaga kelestarian lingkungan dengan menggagas dua program utama, yakni revitalisasi taman dan pembentukan kampung ekologi. Tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, sektor swasta dilibatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kepala DLH Kota Batu, Dian Fachroni, mengatakan revitalisasi taman akan menjadi salah satu program prioritasnya di tahun ini.

"Kami menargetkan sejumlah taman di Kota Batu untuk direvitalisasi agar lebih menarik dan nyaman bagi masyarakat. Selain itu, kami juga mendorong pembentukan kampung ekologi sebagai model pengelolaan lingkungan yang lebih baik di tingkat masyarakat," ujar Dian, Senin (24/3/2025).

Dalam pelaksanaannya, revitalisasi taman akan dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama merupakan penyusunan kajian terkait konsep taman tematik yang akan diterapkan di berbagai sudut Kota Batu. Sedangkan tahap kedua adalah realisasi pembangunan taman tersebut dengan menggandeng pihak swasta sebagai mitra utama.

"Kami akan mengupayakan pembangunan taman tematik dengan melibatkan CSR dari perusahaan yang telah lama bekerja sama dengan Kota Batu. Hal ini penting karena anggaran pemerintah terbatas, sementara kebutuhan akan ruang hijau semakin meningkat," jelas Dian.

Dengan konsep taman tematik, Kota Batu diharapkan memiliki lebih banyak ruang terbuka hijau yang tidak hanya mempercantik kota, tetapi juga berfungsi sebagai destinasi wisata. Menurutnya, setiap taman nantinya akan memiliki tema unik yang mencerminkan karakteristik lokal, budaya, atau konsep edukasi lingkungan.

Selain revitalisasi taman, DLH juga menginisiasi pembentukan kampung ekologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan. Dian menjelaskan, kampung ekologi ini akan menjadi percontohan dalam penerapan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis komunitas.

"Kampung ekologi akan menerapkan berbagai program yang mencakup pengelolaan sampah,

penghijauan, penghematan energi, serta peningkatan kualitas air dan udara. Dengan konsep ini, masyarakat akan lebih aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan," kata Dian.

Untuk memastikan program ini berjalan optimal, DLH akan menggandeng pemerintah desa dan kelurahan dalam proses sosialisasi. Masyarakat akan diajak berpartisipasi melalui berbagai kegiatan, seperti penanaman tanaman obat keluarga (toga), pemilahan sampah, serta pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk dan limbah anorganik menjadi produk kerajinan.

"Sampah yang bisa didaur ulang akan dimanfaatkan menjadi barang bernilai ekonomi, sedangkan sampah organik akan diolah menjadi pupuk pertanian. Selain itu, setiap kampung ekologi akan dilengkapi dengan sumur biopori untuk menyerap air hujan dan mencegah banjir," imbuhnya.

Dian menambahkan, kampung ekologi juga dapat menjadi destinasi



Ilustrasi kampung ekologi, Kampung Sakura di Desa Sidomulyo Kota Batu. (dok. ist)

wisata edukasi di Kota Batu. Dengan konsep yang menarik dan bermanfaat, wisatawan dapat belajar mengenai pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang dapat diterapkan di daerah lain.

"Jika program ini sukses, kampung ekologi bisa menjadi daya tarik wisata alternatif. Wisatawan tidak hanya menikmati keindahan Kota Batu, tetapi juga memperoleh edukasi tentang lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan," terangnya. (Santi/Dya)

Korsel Tunjuk Lagi Han Duck-soo sebagai Penjabat Presiden



Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo tiba di Kompleks Pemerintah di Seoul, Korea Selatan, Senin (24/3/2025). (Reuters)

SEOUL - Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memulihkan Han Duck-soo sebagai penjabat presiden pada hari Senin (24/3/2025), membatalkan pemakzulannya karena ia berjanji untuk fokus mengarahkan ekonomi terbesar keempat di Asia itu melalui "perang dagang" AS.

Putusan tersebut, yang dikeluarkan di tengah kekacauan politik selama berbulan-bulan di negara itu, segera mengembalikan Han ke tampuk kekuasaan. Ia mengambil alih jabatan sebagai pemimpin sementara dari Presiden Yoon Suk Yeol, yang dimakzulkan atas penerapan darurat militer pada bulan Desember.

"Saya yakin rakyat menyatakan dengan sangat jelas, dalam satu suara, bahwa konfrontasi ekstrem dalam politik harus dihentikan," kata Han,

yang berterima kasih kepada pengadilan atas "keputusan bijaknya" dan kabinet atas kerja keras mereka saat ia diskors.

"Sebagai penjabat presiden, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kestabilan administrasi negara, dan mencurahkan semua kebijaksanaan dan kemampuan untuk melindungi kepentingan nasional dalam perang dagang," kata Han dalam komentar yang disiarkan televisi.

Korea Selatan, salah satu eksportir terbesar dunia, telah bersiap menghadapi dampak potensial dari berbagai ancaman tarif di bawah Presiden AS Donald Trump.

Korea Selatan telah menerapkan tarif AS untuk baja dan aluminium dan telah berupaya memperoleh pengecualian dari tarif timbal balik AS bulan depan. Awal bulan ini, Trump

secara khusus mengecam Korea Selatan karena menerapkan tarif tinggi pada ekspor AS.

Pernyataan darurat militer Yoon menjerumuskan sekutu militer utama AS itu ke dalam krisis politik terbesar dalam beberapa dekade, dan memicu kekosongan kepemimpinan di tengah meningkatnya pemakzulan, pengunduran diri, dan dakwaan pidana terhadap sejumlah pejabat tinggi.

Han awalnya menjabat kurang dari dua minggu dan dimakzulkan serta diskors pada tanggal 27 Desember setelah berselisih dengan parlemen yang dipimpin oposisi dengan menolak mengangkat tiga hakim lagi ke Mahkamah Konstitusi.

Para hakim pengadilan tersebut pada hari Senin memutuskan dengan suara tujuh berbanding satu untuk membatalkan pemakzulan tersebut.

Menteri Keuangan Choi Sang-mok telah mengambil alih posisi penjabat presiden saat kasus Yoon dan Han berada di Mahkamah Konstitusi.

Sebabkan Konflik

Diketahui Han, 75, telah menjabat dalam posisi kepemimpinan selama lebih dari tiga dekade di bawah lima presiden, baik konservatif maupun liberal.

Di negara yang terpecah tajam oleh retorika partisan, Han merupakan contoh langka pejabat yang kariernya yang bervariasi melampaui garis partai.

Meski begitu, parlemen yang dipimpin oposisi menuduhnya tidak

berbuat cukup banyak untuk menggagalkan keputusan Yoon untuk mengumumkan darurat militer, sebuah tuduhan yang dibantahnya.

Lee Jae-myung, ketua oposisi Partai Demokrat, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera membuat keputusan tentang pemakzulan Presiden Yoon.

Pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan keputusan dalam beberapa hari. Yoon juga menghadapi persidangan pidana terpisah atas tuduhan memimpin pemberontakan dengan memberlakukan darurat militer.

Jika Yoon disingkirkan, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.

"Penundaan pengadilan yang terus-menerus dalam memutuskan memicu kekhawatiran dan konflik," kata Lee, yang menurut jajak pendapat akan memenangkan pemilihan jika Yoon disingkirkan.

Korea Selatan telah menyaksikan unjuk rasa besar-besaran, yang sebagian besar berlangsung damai, baik yang mendukung Yoon maupun menuntut pemecatannya dalam beberapa bulan terakhir.

Lim Ji-bong, seorang profesor hukum di Universitas Sogang, mengatakan ia berharap pengadilan akan menyingkirkan Yoon. Para hakim akan ingin menunjukkan bahwa mereka dapat "bersatu untuk membuat keputusan yang berani guna menghentikan perpecahan nasional yang semakin dalam," katanya. (Reuters,ist/nei)

Israel Akui 13 Permukiman Yahudi di Tepi Barat

TEPI BARAT - Pemerintah Israel mengesahkan 13 permukiman Yahudi baru di wilayah Tepi Barat yang diduduki, keputusan yang mendapat kecaman tajam dari Otoritas Palestina.

Pengakuan yang diberikan kabinet keamanan Israel itu meningkatkan status permukiman Yahudi di Tepi Barat menjadi permukiman independen, setelah sebelumnya menjadi bagian dari permukiman Yahudi lainnya yang sudah dibangun terlebih dahulu.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Senin (24/3/2025), mengecam keputusan kabinet keamanan Israel itu sebagai bentuk "pengabaian terhadap legitimasi internasional dan resolusinya".

Tepi Barat yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam, menjadi rumah bagi sekitar 3 juta warga Palestina, juga bagi hampir 500.000

warga Israel yang tinggal di area-area permukiman Yahudi, yang ilegal menurut hukum internasional.

Pengakuan untuk belasan permukiman Yahudi baru di Tepi Barat itu diumumkan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, pada Minggu (23/3/2025). Dia mengatakan bahwa kabinet keamanan Tel Aviv telah menyetujui rencana untuk memisahkan 13 permukiman Yahudi di Tepi Barat dari komunitas tetangga mereka.

Dikatakan Smotrich bahwa permukiman-permukiman itu pada akhirnya akan diakui sebagai permukiman independen. Smotrich mengumumkan persetujuan itu dalam pernyataan via media sosial X, menyusul persetujuan untuk puluhan ribu unit rumah di seluruh area Tepi Barat.

"Pengakuan masing-masing (area permukiman) sebagai komunitas terpisah merupakan langkah penting



Bangunan baru berdiri di area permukiman Israel di Tepi Barat (Reuters)

yang akan membantu pengembangannya," sebut Smotrich dalam pernyataannya.

"Kita terus memimpin revolusi normalisasi dan regulasi di permukiman-permukiman (Yahudi). Alih-alih bersembunyi dan meminta maaf kami mengibarkan bendera, membangun

dan menetap," kata Smotrich.

"Ini adalah langkah penting lainnya pada rute menuju kedaulatan yang sebenarnya di Yudea dan Samaria," ucapnya, menggunakan istilah yang dipakai Israel untuk menyebut Tepi Barat. (AFP, Al Arabiya, Reuters,ist/nei)

Mudik Nyaman Tanpa Mabuk! Ini Rahasia Anti-Mual

MUDIK merupakan tradisi yang melekat pada perayaan Idul Fitri di Indonesia, di mana jutaan umat Muslim melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman menggunakan berbagai moda transportasi seperti pesawat, kapal, dan kendaraan darat.

Meski demikian, mudik menempuh perjalanan yang panjang seringkali memberikan tantangan tersendiri khususnya bagi mereka yang rentan mengalami mabuk perjalanan. Mabuk perjalanan ditandai dengan gejala seperti pusing, mual, keringat dingin, bahkan muntah, yang dapat mengganggu kenyamanan. Untuk menghindari hal tersebut, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan.

Seperti dikutip dari Antara, berikut adalah tipsnya.

Pilih Tempat Duduk yang Minim Guncangan

Memilih tempat duduk yang minim guncangan bisa membantu kamu untuk menghindari mabuk perjalanan. Jika menggunakan mobil, duduk di kursi penumpang depan dapat mengurangi efek guncangan.

Sementara itu, bagi yang naik pesawat, tempat duduk yang sejajar dengan sayap adalah pilihan terbaik karena lebih stabil dibandingkan bagian lain dari pesawat. Pastikan juga untuk selalu duduk menghadap ke depan sesuai dengan arah laju kendaraan.

Hirup Udara Segara

Berada di dalam kendaraan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan

rasa pengap dan memicu mabuk perjalanan. Membuka jendela untuk mendapatkan udara segar atau mengarahkan pendingin udara (AC) langsung ke wajah dapat membantu meningkatkan sirkulasi udara dan mengurangi rasa mual.

Penuhi Asupan Cairan

Menjaga tubuh tetap terhidrasi merupakan cara efektif untuk mencegah mabuk perjalanan. Dehidrasi dapat memperparah gejala pusing dan mual. Oleh karena itu, bawalah air putih dalam jumlah yang cukup. Selain air putih, jus dan susu juga bisa menjadi pilihan yang baik, sementara kopi dan minuman bersoda sebaiknya dihindari karena dapat memicu dehidrasi.

Mengonsumsi Jahe

Jahe dikenal sebagai tanaman herbal yang memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk untuk meredakan mabuk perjalanan. Penelitian menunjukkan bahwa jahe dapat membantu menjaga fungsi pencernaan dan mengurangi rasa mual. Mengonsumsi teh jahe atau permen jahe sebelum dan selama perjalanan bisa menjadi solusi alami yang efektif.

Menghirup Minyak Peppermint

Minyak peppermint memiliki aroma yang dapat meredakan mual dan memberikan efek menenangkan. Menghirup minyak ini selama perjalanan bisa menjadi cara alami untuk mengurangi mabuk perjalanan. Namun, jangan menghirupnya terlalu lama, karena bisa memicu rasa mual.

Menekan Titik Akupresur di Pergelangan Tangan

Teknik akupresur telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk mengatasi mual. Menekan titik tertentu di pergelangan tangan bagian dalam dengan tiga jari (telunjuk, tengah, dan manis) selama beberapa detik dapat membantu meredakan mabuk perjalanan.

Mengurangi Penggunaan Gawai

Menggunakan ponsel atau tablet di perjalanan dapat memicu mabuk perjalanan karena mata dan telinga menerima sinyal yang tidak sinkron dengan pergerakan kendaraan. Untuk menghindarinya, kurangi penggunaan gawai dan alihkan perhatian ke aktivitas lain seperti mendengarkan musik atau berbincang dengan teman perjalanan.

Hindari Baca Buku

Membaca buku dalam perjalanan juga dapat memicu mabuk perjalanan karena otak menerima sinyal yang bertentangan antara apa yang dilihat mata dan gerakan kendaraan. Sebagai alternatif, mendengarkan audiobook atau podcast bisa menjadi pilihan yang lebih nyaman.

Hindari Makanan Pemicu Asam Lambung

Mengonsumsi makanan pedas, berminyak, dan asam sebelum atau selama perjalanan dapat menyebabkan naiknya asam lambung, yang berujung pada mual dan muntah. Sebaiknya pilih makanan ringan seperti roti, biskuit, pisang, atau apel yang lebih ramah bagi pencernaan.

Mengonsumsi Obat Anti-Mabuk Perjalanan

Jika cara alami belum cukup efektif, mengonsumsi obat mabuk perjalanan seperti scopolamine, promethazine, atau dramamine bisa menjadi solusi. Obat-obatan ini sebaiknya dikonsumsi sebelum perjalanan agar bekerja secara optimal. Namun, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau sedang hamil, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengonsumsi obat-obatan tersebut.

Penyebab Mabuk Perjalanan saat Arus Balik Mudik

Mabuk perjalanan adalah kondisi yang bisa menyerang siapa saja. Kondisi ini terjadi akibat ketidakmampuan otak dalam menerima campuran sinyal yang berbeda dari beberapa anggota tubuh.

Selama berada dalam perjalanan, seluruh bagian tubuh memang akan merasakan gerakan yang sama, tetapi sebetulnya setiap anggota tubuh memberikan respon yang berbeda.

Misalnya mata bergerak melihat jalanan dan pepohonan yang dilewati. Sedangkan otak dan persendian merasakan bahwa tubuh sedang berada dalam posisi diam.

Selain itu, telinga bagian dalam yang berisi cairan juga mengalami guncangan selama kendaraan melaju. Sinyal-sinyal berbeda ini yang dikirim ke otak, tetapi otak tidak dapat memproses sinyal yang berbeda tersebut. Hal ini membuat reaksi otak menjadi kacau dan kebingungan. Alhasil, timbul keluhan mabuk perjalanan seperti mual, pusing, dan muntah. Adapun beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko mabuk perjalanan, (nei,ist/dya)



Blaze Star Diprediksi Meledak 27 Maret 2025

Bintang T Coronae Borealis atau yang dikenal sebagai **Blaze Star**, diprediksi akan meledak dalam waktu dekat. Para ilmuwan memperkirakan ledakan ini akan terjadi pada tahun ini, namun masih ada keraguan tentang tanggal pastinya. Apakah bintang ini akan meledak pada 27 Maret 2025 atau mungkin 10 November 2025?

Dikutip dari earthsky, Jean Schneider dari Observatorium Paris, menerbitkan prediksi ini dalam Catatan Penelitian American Astronomical Society pada Oktober 2024.

Schneider memperkirakan tanggal-tanggal yang memungkinkan dengan menggunakan kombinasi tanggal letusan sebelumnya dan ephemeris orbit sistem biner.

Dalam makalahnya, Schneider mengakui tidak seorang pun dapat memprediksi letusan secara tepat, ia mencoba memprediksi tanggal letusan dengan presisi satu atau dua minggu.

Blaze Star merupakan bintang yang berada di konstelasi Corona Borealis, Northern Crown, yang seharusnya berubah menjadi nova tahun lalu.

Memprediksi letusan bintang bukanlah ilmu pasti. Blaze Star (T Coronae Borealis) mengalami dua letusan yang diketahui dan dicatat oleh para astronom. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 12 Mei 1866 dan 9 Februari 1946. Letusan tersebut terjadi dalam rentang waktu 80 tahun.

Jadi, para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam 80 tahun berikutnya, bintang tersebut akan meletus lagi. Jadi, 80 tahun dari tahun 1946 akan menjadi tahun 2026. Hal ini menimbulkan pertanyaan: Mengapa para astronom mengira letusan tersebut akan terjadi pada tahun

2024?

Nah, bintang itu menjadi terang dan redup sebelum letusan terakhirnya pada tahun 1946. Dan sekarang bintang itu juga menjadi terang dan redup, membuat beberapa orang berpikir nova akan terjadi lebih cepat daripada nanti. Namun tampaknya nanti lebih mungkin terjadi. Jadi kita tunggu saja.

Mengapa bintang itu akan menjadi nova?

Blaze Star bukan satu bintang, melainkan dua. Bintang itu adalah sistem biner dengan katai putih dan raksasa merah. Katai putih adalah sisa-sisa bintang, inti bintang mirip matahari yang terekspos yang melepaskan lapisan luarnya di akhir kehidupan deret utamanya. Bintang itu adalah bintang superpadat dengan massa seperti matahari kita, tetapi hanya seukuran Bumi.

Katai putih Blaze Star telah mengumpulkan material di

permukaannya, yang disedot dari bintang raksasa merah. Secara berkala, bintang itu "tidak dapat menahan lebih banyak lagi" dan meledak, sekitar setiap 80 tahun.

Rasi bintang yang mudah ditemukan ini tampak seperti huruf C terbalik pada saat ini. Rasi bintang ini terletak di antara bintang terang Arcturus dan bentuk bintang empat beraturan persegi Hercules. Lihatlah ke arah timur ke bintang-bintang yang muncul di balik cakrawala sebelum fajar. Temukan bintang oranye terang Arcturus. Kemudian, di kiri bawah Arcturus terdapat bentuk C terbalik.

Pada musim panas, rasi bintang ini akan berada tinggi di langit lagi. Anda selalu perlu meluangkan waktu untuk menyesuaikan mata Anda dalam kegelapan sebelum dapat melihat rasi bintang dengan benar. Selain itu, teropong akan menjadi ide yang bagus. Dan Anda harus siap berangkat saat kami mendapatkan beritanya, karena

berita itu hanya akan tersedia selama beberapa hari.

Seberapa terangkah Blaze Star?

Ledakan nova Blaze Star yang sebenarnya kemungkinan akan mengerdikan ledakan apa pun yang pernah Anda lihat. Namun, bintang itu sangat jauh. Seberapa terangkah bintang itu di langit kita? Para astronom memperkirakan bintang itu akan mencapai magnitudo tampak 2. Itu adalah kecerahan yang cukup baik untuk sebuah bintang. Bintang itu sebanding dengan bintang paling terang di Northern Crown, Jewel of the Crown, Alphecca. Jadi, selama beberapa hari, Northern Crown akan memiliki dua permata!

T Corona Borealis – Blaze Star – juga merupakan salah satu bintang terjauh yang pernah Anda lihat. Alphecca berjarak sekitar 75 tahun cahaya, sedangkan Blaze Star berjarak sekitar 3.000 tahun cahaya. Jadi, itu memberi Anda beberapa perspektif tentang magnitudo absolut (kecerahan) ledakan dahsyat ini. Dan karena cahaya ledakan ini telah menempuh perjalanan selama 3.000 tahun untuk sampai di sini, secara relatif nova itu terjadi selama Zaman Perunggu.

Nova berada 40 kali lebih jauh daripada Alphecca. Selain itu, kita tidak melihat kedua bintang tersebut pada saat yang bersamaan. Satu bintang terlihat seperti 75 tahun yang lalu dan yang lainnya terlihat seperti 3.000 tahun yang lalu. Mungkin sulit untuk memahami hal itu!

Nova akan mencerahkan bintang hingga ribuan kali lipat, biasanya hanya dalam beberapa jam, lalu butuh beberapa hari untuk memudar lagi. Setelah selesai, bintang akan kembali ke penampilan normalnya. (nei,ist/dya)



Ide Hampers Lebaran 2025, Unik dan Berkesan

LEBARAN adalah saat yang sarat dengan kehangatan dan kebersamaan, di mana berkumpul dengan keluarga dan sahabat serta memberikan hampers menjadi tradisi yang semakin populer. Hampers Lebaran tidak hanya sekadar hadiah, melainkan juga merupakan simbol kasih sayang dan perhatian bagi orang-orang tercinta.

Hamper tidak harus berupa makanan dan minuman saja, tetapi dapat dibuat atau diisi dengan benda-benda bermanfaat lainnya. Pemberian ini diharapkan dapat digunakan dengan baik atau menjadi hal yang berkesan bagi penerimanya.

Ide Hampers Lebaran 2025

Menurut buku Setiap Pebisnis Harus Tahu Promo Upselling Cross-selling Ini!, Dini Hertita, (2023:76), hamper pertama kali dikenalkan oleh William The Conqueror yang memerintah pada abad ke-11 tepatnya setelah pertempuran Hastings. Hamper berasal dari Bahasa Perancis "hanapier" yang artinya "keranjang utukpiala".

Kreasi dalam membuat hamper dapat menambah makna dan nilai pada pemberian tersebut. Inilah beberapa ide hampers Lebaran 2025 yang simpel dan berkesan sehingga dapat dijadikan referensi sebelum memberikannya kepada orang-orang tersayang.

Peralatan Salat

Memberikan hampers peralatan salat sebagai hadiah lebaran adalah pilihan yang penuh makna. Selain itu, pemberian hampers peralatan salat juga sebagai pengingat untuk lebih mendekatkan diri pada Allah. Hampers ini bisa berisi sajadah dengan motif elegan, mukena, sarung berbahan premium, serta tasbih kayu atau

digital. Tak lupa, tambahkan Al-Quran berukuran praktis atau buku doa agar penerima semakin termotivasi dalam beribadah.

Makanan Sehat

Mengonsumsi makanan sehat kini sudah menjadi lifestyle yang banyak dianut oleh masyarakat. Untuk itu, Anda bisa memberikan hampers lebaran berupa makanan sehat. Isi hampers ini bisa beragam, mulai dari granola, madu murni, susu almond, hingga teh herbal yang menenangkan. Tambahkan camilan sehat seperti kacang almond panggang, dark chocolate, atau kurma premium yang kaya manfaat.

Makanan Khas Nusantara

Selanjutnya ide hamper Lebaran 2025 yang cocok diberikan adalah hampers yang berisi makanan khas nusantara. Pada momen tersebut, pastinya semua akan berkumpul dan makanan dapat dinikmati bersama.

Tumbler

Tumbler bisa menjadi pilihan untuk ide hampers lebaran. Tumbler tidak hanya berfungsi sebagai wadah minuman, tetapi juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, sehingga bisa bermanfaat untuk menjaga lingkungan. Agar lebih istimewa, Anda bisa memberikan tumbler dengan nama seseorang yang Anda tuju. Untuk melengkapi, Anda bisa memasukkan teh herbal, kopi spesial, atau infused water mix.

Lapis Legit

Lapis legit kini menjadi makanan yang viral setelah mendapat berbagai review dari para food vlogger. Anda bisa memberikan hampers lapis legit pada orang tersayang. Ada banyak varian lapis legit yang bisa diberikan sebagai hampers, seperti lapis legit original, prunes dengan taburan kismis, atau lapis legit keju yang gurih. Agar tampak istimewa, Anda bisa mengemasnya dalam kotak eksklusif.

Bika Ambon

Bika ambon juga bisa menjadi pilihan untuk hampers lebaran 2025. Teksturnya yang kenyal dan berserat serta aroma harum dari kunyit dan santan menjadikannya sajian istimewa di momen lebaran. Anda bisa mengirimkan bika ambon dengan berbagai varian rasa, seperti original, pandan, hingga keju.

Peralatan Makan

Hampers peralatan makan bisa menjadi pilihan hadiah yang tidak hanya cantik, tetapi juga bermanfaat dan penuh makna. Anda bisa mengisi hampers dengan set piring dan mangkuk keramik, sendok dan garpu, atau gelas kaca premium yang mempercantik meja makan.

Voucher Belanja

Selain makanan dan barang yang cantik, Anda juga bisa memberikan

hampers berupa voucher belanja. Agar tampilannya lebih cantik, Anda bisa membungkusnya dengan amplop cantik disertai dengan kartu ucapan lebaran.

Makanan Lebaran

Selain kue kering, makanan khas lebaran seperti opor ayam atau rendang bisa dijadikan pilihan untuk hampers yang menarik. Anda bisa mengirimkan hampers ini saat malam takbiran atau setelah salat ied agar rasanya masih terjaga.

Parfum

Parfum juga menjadi produk yang penting, khususnya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Anda bisa memberi hampers parfum dengan aroma khas yang lembut dan mewah. Anda bisa menambahkan body lotion dengan wangi yang sama agar wanginya bisa bertahan lama. (nei,ist/dya)



Ada Thaksin (dari Hal 1)

PENGUMUMAN daftar nama pengurus Danantara membawa sentimen kurang baik pada pasar. Dalam kepengurusan itu, nama mantan Perdana Menteri (PM) Thailand Thaksin Shinawatra masuk menjadi Dewan Penasihat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan daftar nama pengurus Danantara itu membuat investor bereaksi. "Investor bereaksi negatif ya melihat susunan

pengurus Danantara, terutama masuknya Thaksin sebagai Dewan Penasihat. Padahal Thaksin punya deretan kasus seperti korupsi dan penghindaran pajak contohnya tahun 2006 saat keluarga Thaksin melepas saham Shin Corp ke Temasek tanpa membayar capital gain tax," ujar Bhima di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Track record Thaksin tersebut semestinya dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah. Namun, pemerintah justru mengabaikan hal itu.

Bhima melanjutkan, Thaksin juga terseret kasus pembelian lahan pemerintah di Bangkok pada 2008 silam. Pria 75 tahun itu juga pernah menjadi buronan selama 17 tahun, sebelum akhirnya pulang kembali pada 22 Agustus 2023 lalu. Kepulangan bersejarah yang bertepatan dengan upaya sekutu politiknya untuk membentuk pemerintahan baru dengan beberapa saingan terbesarnya.

Menurut Bhima, berbagai skandal yang dialami Thaksin itu turut menjadi salah satu biang kerok yang membuat kepercayaan publik makin terkikis pada Danantara.

"Distrust terhadap Danantara makin besar. Pemerintah overconfidences. Seharusnya pemerintah mau mendengar masukan dan menggunakan Danantara untuk memasukkan talenta terbaik, bukannya malah memasukkan politisi," jelas Bhima.

Thaksin digulingkan dalam sebuah kudeta militer pada 2006 yang dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin, atas dasar tuduhan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Tak hanya itu, ia juga dilarang berpolitik dan partainya dibubarkan. Ia lalu hidup di pengasingan selama 15 tahun di berbagai negara, termasuk di Inggris, Uni Emirat Arab, hingga Montenegro.

Meski demikian, pengaruh Thaksin dalam politik Thailand tetaplah kuat. Salah satu contohnya adalah terpilihnya adiknya, Yingluck Shinawatra sebagai PM Thailand pada 2011 meski pada 2014 juga dikudeta militer.

Thaksin kembali ke tanah airnya pada 2024 usai partainya, Pheu Thai berkuasa. Saat ini, jabatan PM diemban oleh putrinya yakni Paetongtarn Shinawatra.

Pada September 2024, Thaksin sempat bertemu Prabowo Subianto yang saat itu berstatus presiden terpilih. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo berharap bisa bertemu lagi dengan Thaksin di Indonesia.

"Menghormati persahabatan antara keluarga kita, dan berharap dapat menyambut Anda di Indonesia," kata Prabowo dalam akun Instagramnya pada 7 September 2024.

Sejumlah nama lain yang ada di dalam badan anyar tersebut juga dinilai memiliki konflik kepentingan yang cukup tinggi.

"Ray Dalio dan Chapman Taylor, keduanya adalah pengendali dan

founder dari Global Hedge Fund yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Saat ini, keduanya adalah OD dan IOD atas kondisi keuangan seluruh BUMN, dan apa jaminannya tidak ada benturan kepentingan dengan usaha hedge fund (dan nasabah di belakangnya) dalam setiap aksi korporasi Danantara?" ujar pengamat ekonomi Yanuar Rizki.

Selain Dalio dan Chapman, dia juga menyoroti nama Thaksin Shinawatra yang merupakan pebisnis dan sempat menjadi Perdana Menteri Thailand. Thaksin, kata Yanuar, pernah dituntut dengan pasal benturan kepentingan ketika menjadi perdana menteri.

Karenanya dia mempertanyakan pernyataan CEO BPI Danantara Rosan Perkasa Roeslani yang menyebutkan nama-nama pengurus Danantara memiliki rekam jejak yang baik.

Nama lain yang disorot ialah Bono Daru Adji. Yanuar mengatakan Bono juga memiliki potensi konflik kepentingan yang tinggi berkaca dari historis.

"Bono Adji ditulis prestasinya sebagai penasihat merger gojek dan tokopedia dan IPO Goto. Harap dicatat, saat Gojek Tokopedia merger ada transaksi pembelian saham dengan harga tinggi oleh Telkom via Telkomsel, di saat yang sama Bono Aji juga Komisaris Telkom," urainya.

Diklaim dapat membawa perbaikan pada sistem dan tata kelola. Diketahui, dalam konferensi pers pengumuman nama-nama pengurus BPI Danantara, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, nama para pengurus itu merupakan pilihan terbaik yang diharapkan mampu memberikan sinyal positif di pasar.

"Ini harapannya bisa memberikan confidence, keyakinan, ini adalah nama-nama terbaik. Dari nama ini, tidak ada satu nama titipan dari presiden, dan dari nama yang diberikan kepada presiden, tidak ada satu pun yang ditolak," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Rosan juga berharap nama-nama yang menjadi pengurus di BPI Danantara dapat membawa perbaikan pada sistem dan tata kelola. Itu termasuk bagi perusahaan-perusahaan BUMN yang dikelola oleh Danantara.

"Kami ingin introduce sistem di Danantara, BUMN lainnya, sehingga pemilihan dari Danantara dan BUMN itu melalui meritokrasi, berdasarkan capability, integritas, dan track record yang baik dan benar. Ini akan membuka lembaran baru, karena BUMN sudah resmi masuk ke Danantara sejak kemarin," jelas Rosan.

Beda Statmen Soal Rangkap Jabatan

Sementara itu, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani menjawab pertanyaan apakah ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Hal ini mengingat penjelasannya bahwa nama-nama yang masuk ke dalam kepengurusan Danantara akan

mundur dari jabatan di kantor masing-masing. Pernyataan itu ia sampaikan saat pengumuman kepengurusan BPI Danantara pada Senin (24/3/2025).

Menurut Rosan, jabatannya sebagai CEO Danantara dan Menteri Investasi serta Hilirisasi saling melengkapi. "Kan saya sudah sampaikan beberapa kali, saling complimentary. Saya Menteri Investasi, dan tugas Danantara apa? Investasi. Jadi saling menunjang, saling complimentary," ujar Rosan di Menara CIMB Niaga, Jakarta, Senin (24/3/2025).

Ia kemudian menjelaskan, jika ada investor yang ingin menanamkan modal di Indonesia dan berkomunikasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi, maka hal itu akan menambah keyakinan investasi secara luas.

Selain itu, investor yang ingin berkontribusi ke Danantara juga bisa berkomunikasi dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Rosan lantas menyinggung soal birokrasi yang selama ini kerap dipersoalkan sebagai penghambat investasi. Dengan dua jabatan yang dipegangnya ini, diharapkan bisa mengurangi kondisi silo atau kurang koordinasi di masing-masing pihak. "Sehingga (investasi) bisa lebih cepat, transparan, dan selama ini saya dasarnya dengan track record saya yang ada, dan tadi pemilihan sudah dilakukan, kan bisa dilihat orang-orangnya terbaik di bidangnya," tambah Rosan.

Padahal sebelumnya, Risan mengatakan mereka yang telah terpilih dipastikan akan meninggalkan jabatan lamanya dan fokus bekerja di Danantara.

"Di kami tidak boleh ada yang rangkap jabatan di level di bawah kami," kata Rosan dalam konferensi pers di Gedung Graha Cimb Niaga, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).

Rosan mencontohkan Sanjay Bharwani yang ditunjuk jadi Managing Director Human Resources Danantara. Sebelumnya, ia merupakan Presiden Direktur Bester & Co dan salah satu pakar strategi HR yang terkemuka di Indonesia.

Kemudian Reza Yamora Siregar yang ditunjuk jadi Managing Director/Chief Economist Danantara. Sebelumnya ia menjabat sebagai Staf Khusus Menteri - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kemudian pernah di Institute of International Finance sebagai Chief Representative Singapore, Head of ASEAN & India Research (2018-2019), hingga di IMF dan Goldman Sachs.

"Pak Reza Siregar ini nanti akan memimpin tim ekonomi kami ke depannya agar setiap investasi maupun setiap hal yang berhubungan dengan Danantara bisa kita analisa secara komprehensif," ucap Rosan.




Lalu Agus Dwi Handaya yang ditunjuk sebagai Managing Director Danantara. Ia harus meninggalkan jabatan sebelumnya sebagai Compliance, Legal and Human Capital Director PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (wid, din, ktn, rls, ant, ist/dya)

**DAFTAR JAJARAN
PENGURUS DANANTARA**

Board of Danantara



-  Kepala Badan/Chief Executive Officer (CEO), Rosan Roeslani.
-  Chief Operational Officer (COO) Dony Oskaria.
-  Chief Investment Officer (CIO) Pandu Sjahriti.

Dewan pengawas






-  Erick Thohir.
-  Muliaman Hadad.
-  Sri Mulyani Indrawati.

○ Para menko dan Mensetneg.

Dewan Pengarah



-  Joko Widodo (Jokowi).
-  Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dewan Penasihat

-  Ray Dalio.
-  Helman Sitohang.
-  Jeffrey Sachs.
-  F. Chapman Taylor.
-  Thaksin Shinawatra.

Komite Pengawasan dan Akuntabilitas

- Ketua PPATK.
- Ketua KPK.
- Ketua BPK.
- Ketua BPKP.
- Kapolri.
- Jaksa Agung.

-  Komite Manajemen Risiko: John Prasetyo.
-  Komite Investasi dan Portofolio: Yup Kim.

Managing Director

- Managing Director Legal: Robertus Bilitae.
- Managing Director Risk & Sustainability: Lieng Seng Wee.
- Managing Director Finance: Arief Budiman.
- Managing Director Treasury: Ali Setiawan.
- Managing Director Global Relations & Governance: Mohamad Al-Arief.
- Managing Director Stakeholder Management: Rohan Hafas.
- Managing Director Internal Audit: Ahmad Hidayat.
- Managing Director Human Resources: Sanjay Bharwani.
- Managing Director/Chief Economist: Reza Yamora Siregar.
- Managing Director Head of Office: Ivy Santoso.

Holding Operasional

- Managing Director: Agus Dwi Handaya.
- Managing Director: Febriny Eddy.
- Managing Director untuk Risk: Riko Banardi.

Holding Investasi

- Managing Director Finance: Djamal Attamimi.
- Managing Director Legal: Bono Daru Adji.
- Managing Director Investment: Stefanus Ade Hadiwidjaja.

Polri Singgung Manfaat Keamanan SKCK Saat Kementerian HAM Usul Penghapusan

JAKARTA - Polri menyatakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan data yang bermanfaat untuk meningkatkan keamanan. Sebab, berisi latar belakang seseorang terkait ada tidaknya keterlibatan tindak pidana.

Hal tersebut disampaikan merespons usulan dari Kementerian Hak Asasi Manusia (KemHAM) mengenai penghapusan SKCK.

"Karena SKCK adalah surat keterangan, catatan dalam kejahatan atau kriminalitas. Ini tersimpan dalam satu catatan-catatan yang di kepolisian di mana manfaatnya ini juga dalam rangka meningkatkan keamanan dan itu juga dalam pelayanan," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Selain itu, SKCK juga disebut memudahkan proses dalam mengidentifikasi dan pengawasan serta pengendalian keamanan.

Namun, Polri disebut akan terbuka terhadap masukan apapun. Tapi, ditegaskan bila regulasi atau aturan mengenai SKCK diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 serta Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.

"Tentu apa yang jadi masukan secara positif kami juga akan menghargai dan akan menjadi bagian untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat," kata Trunoyudo.

Sebelumnya, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada Jumat ini.

"Alhamdulillah tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis," kata Nicholay.

Sulit Kerja Salah Satu Alasannya

Mulanya, Nicholay menceritakan dirinya menemukan narapidana yang



(Ilustrasi) Pemeriksaan narapidana terkena penyakit kulit di Lapas Kelas IIA Karawang. (Dok.Lapas Kelas IIA Karawang)

berstatus residivis. Ia mengaku heran dan menanyakan permasalahan mereka kembali menghuni Lapas.

"Ada juga yang residivis. Saya tanya kenapa residivis? [Kemudian dijawab] 'Karena begini, Pak, ketika kami keluar, kami sudah menjalani masa hukuman, kami sudah selesai dan kami sudah mengubah hidup kami menjadi kehidupan normal, kami ingin mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan ekonomi kami. Kami terbebani dengan adanya SKCK oleh kepolisian'," kata Nicholay menirukan percakapan salah satu napi, di Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

"Setiap mereka mencari pekerjaan terbebani dengan SKCK yang dipersyaratkan oleh perusahaan-perusahaan atau tempat yang ingin mereka bekerja," lanjutnya.

KemHAM menjelaskan, kebijakan SKCK ini justru terkesan mendiskriminasi para eks tahanan atau narapidana saat mereka ingin memenuhi kebutuhan hidup setelah keluar dari lapas.

Akan tetapi, lanjut dia, kebijakan itu menghalangi mereka dan justru mendorong mereka melakukan kejahatan lainnya hingga kembali menghuni lapas.

"Sehingga, mereka tidak bisa memperbaiki hidup mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan kembali kejahatan, agar kembali ke penjara lagi, kembali ke lapas lagi, ke rutan lagi," ungkapnya.

"Karena bagi mereka hidup di dalam lapas, di dalam rutan, lebih enak ketimbang di luar. Karena mereka makanan terjamin, walaupun makanan seadanya dan mereka

"Kalaupun mendapatkan SKCK, di dalam SKCK itu tertulis bahwa si A misalnya, si Abdul misalnya, pernah dihukum dan menjadi narapidana. Nah, kalau sudah itu, perusahaan mana, tempat kerja mana yang mau menerima mereka? Pasti akan berpikir," kata dia.

Untuk itu, Nicholay meminta kepada Polri agar menghapuskan kebijakan SKCK tersebut karena dirasa membebani para narapidana.

"Dari beberapa hal tersebut akhirnya saya melaporkan kepada menteri, bahwa kita

harus mengambil langkah yang konkret, yaitu kita meminta kepada pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia untuk meninjau kembali, bahkan mungkin menghapuskan SKCK," ucap Nicholay. (wid, kum, rle/dya)

OKP
Dinas Kelautan & Perikanan
Provinsi Jawa Timur

MENGUCAPKAN

**SELAMAT HARI RAYA
IDUL FITRI
2025/1446 H**

*Taqabbalallahu minna wa minkum,
shiyamana wa shiyamakum.*

Mohon maaf lahir dan batin.
Semoga Allah senantiasa memberkahi kita
dengan kebahagiaan dan kedamaian.

Dr Ir Muhammad Isa Anshori, ATD., MT
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur